



**PROSEDUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh
Anggri Susanto
NIM. 120803102021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



***CONTROL PROCEDURES OF RURAL BANKS BY THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY JEMBER***

REAL WORK PRAKTIKE

*lent as one of condition to get Ahli Madya title
Study Program Diploma III Financial Administration Of Management
Economic Faculty University of Jember*

By

**Anggri Susanto
NIM 120803102021**

***STUDY PROGRAM DIPLOMA III FINANCIAL ADMINISTRATION
OF MANAGEMENT
ECONOMIC FACULTY
UNIVERSITY OF JEMBER
2015***

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Nama : Anggri Susanto
NIM : 120803102021
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi, Universitas Jember
Tempat Pelaksanaan : Otoritas Jasa Keuangan Jember
Waktu Pelaksanaan : 23 Februari s/d 26 Maret 2015
Judul Laporan : **Prosedur Pengawasan Bank Perkreditan
Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember.**

Jember, 07 Mei 2015

Laporan Praktek Kerja Nyata ini
Telah Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Drs. Marmono Singgih., M.Si

NIP. 196609041990021001



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : ANGGRI SUSANTO
NIM : 120803102021
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
**JUDUL : PROSEDUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN
RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER**

Jember, 07 Mei 2015

Mengetahui
Ketua Program Studi
Administrasi Keuangan

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Dra. Susanti Prasetyaningtias., M.Si.
NIP. 196609181992032002

Drs. Marmono Singgih., Msi
NIP. 198202072008122002

JUDUL

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA
PROSEDUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anggri Susanto
NIM : 120803102021
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Diploma III Adminitrasi Keuangan

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal : **19 Mei 2015** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua

Dra. Hj. Sudarsih, M.si
NIP.196212121992012001

Sekretaris

Ariwan Joko N, SE.,MM
NIP.196910071999021001

Anggota

Ema Desia Prajitiasari, SE.,MM
NIP.197912212008122002

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan

Dr. M. Fathorrazi, M.Si
NIP.196306141990021001



MOTTO

**“Tiadado’a yang lebihindahselaindo’a agar cepat lulus
danbekerjauntukmembahagiakankedua orang tua”**

(Anggri Susanto)

**“Hidup di duniacumasatu kali carilahhal yang
membuatmunyamandanhadapi yang
membuatmusakitsertajanganlupatetapfokuspadatujuanawalkamuhidup”**

(Anggri Susanto)

**“Agar dapatmembahagiakanseseorang. Isilahtangannyadengankerja,
hatinyadengankasihsayang,pikirannyadengantujuan,ingatannyadenganilmuy
ang bermanfaat,
masadepannyadenganharapanperutnyadenganmakanan”**

(Frederick E Crane)

**“Banyakkegagalan dalamhidupini di karenakan orang-orang
tidakmenyadaribetapadekatnyamerekadengankeberhasilansaatmerekameny
erah.”**

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Ibunda dan ayahanda tercinta terima kasih atas segala kasih sayang, bimbingan, nasehat, motivasi dan kerja keras yang dilakukan selama ini untuk mendidik serta do'a yang selalu menyertai perjalanan hidupku demi keberhasilan dan kesuksesanku.

Sahabatku dan semua teman-temanku di Fakultas Ekonomi Universitas Jember kebersamaan kita jangan pernah berhenti sampai di sini.

Kos Rusunawa Putra Unej (Kenthus, Kebo, Bagus, Hajir, Jefri, Fariz, Junet, Gozali, Kakang Arif, Kakang Dwi, Arif, Lutfi, dan semuanya) kalian adalah teman kostan yang kompak, terima kasih dukungan dan semangatnya saudaraku.

Teman-teman seperjuangan D3 Administrasi Keuangan angkatan 2012 (Binar, Fafa, Hanif, dan semuanya) terima kasih atas kenangan indahny.

Teman-teman HIMADITA terima kasih atas semangat dan dukungannya

Seluruh karyawan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember yang selalu membantu dan mendukungku.

Almamaterku Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “PROSEDUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER”. Laporan Praktik Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (DIII) pada Jurusan Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam menulis Laporan Praktik Kerja Nyata ini penulis telah menerima bantuan, dukungan, bimbingan, serta sumbangan pikiran. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fathorrazi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Ibu Dra. Susanti. P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Administrasi.
3. Bapak Drs. Marmono Singgih, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan, sehingga penulisan laporan praktek nyata ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Aidil Chaidir selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember yang telah mengizinkan saya untuk praktek kerjanya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mas Farhan, Pak Budi, Pak Ngatmo, Pak Edy, Mbak Novi, Mbak Ikad dan semua pegawai Otoritas Jasa Keuangan Jember yang selalu memberikan masukan-masukan positif selama saya magang.
7. Kedua orang tuadan Keluargabesarku, terimakasih atas kasih sayang dan doayang tak pernah putus.

8. KeluargabesarRusunawa Putra, keluargakedua yang selalumengiringiperjuanganku.
9. Sahabatkuter cintaFafa, Binar, Bagus, Ghazali, Lutfi, Junet, Arif, Dwi, Arif. H, Pram, Agil, Kebo,Bayu, Hajir, JefridanKentusterimakasihatasdukungan kalian.
10. Teman-temanseperjuangan Diploma III AdministrasiKeuanganFakultasEkonomiUniversitasJember, terimakasihatasdukungannya.
11. Semuapihak yang tidakdapatdisebutkansatupersatu yang telahmembantupenulisdalammenyelesaikanlaporan. Semogakontribusi yang diberikandicatatsebagaiamalibadah.
12. Teman-teman HIMADITA yang selalu menyemangati
PenulismenyadarisepenuhnyabahwaLaporanPraktikKerjaNyatainimasihjauh
darikontekssempurnakarenaketerbatasanwaktudankemampuan,
sertakesempatandalammendapatkan data-data yangpenulisperlukan. Untukitu,
penulismengharapkankritikdan saran yang membangundari para pembaca.
Semogalaporanpraktikkerjanyaatainimemberikanmanfaat yang positifbagikita.

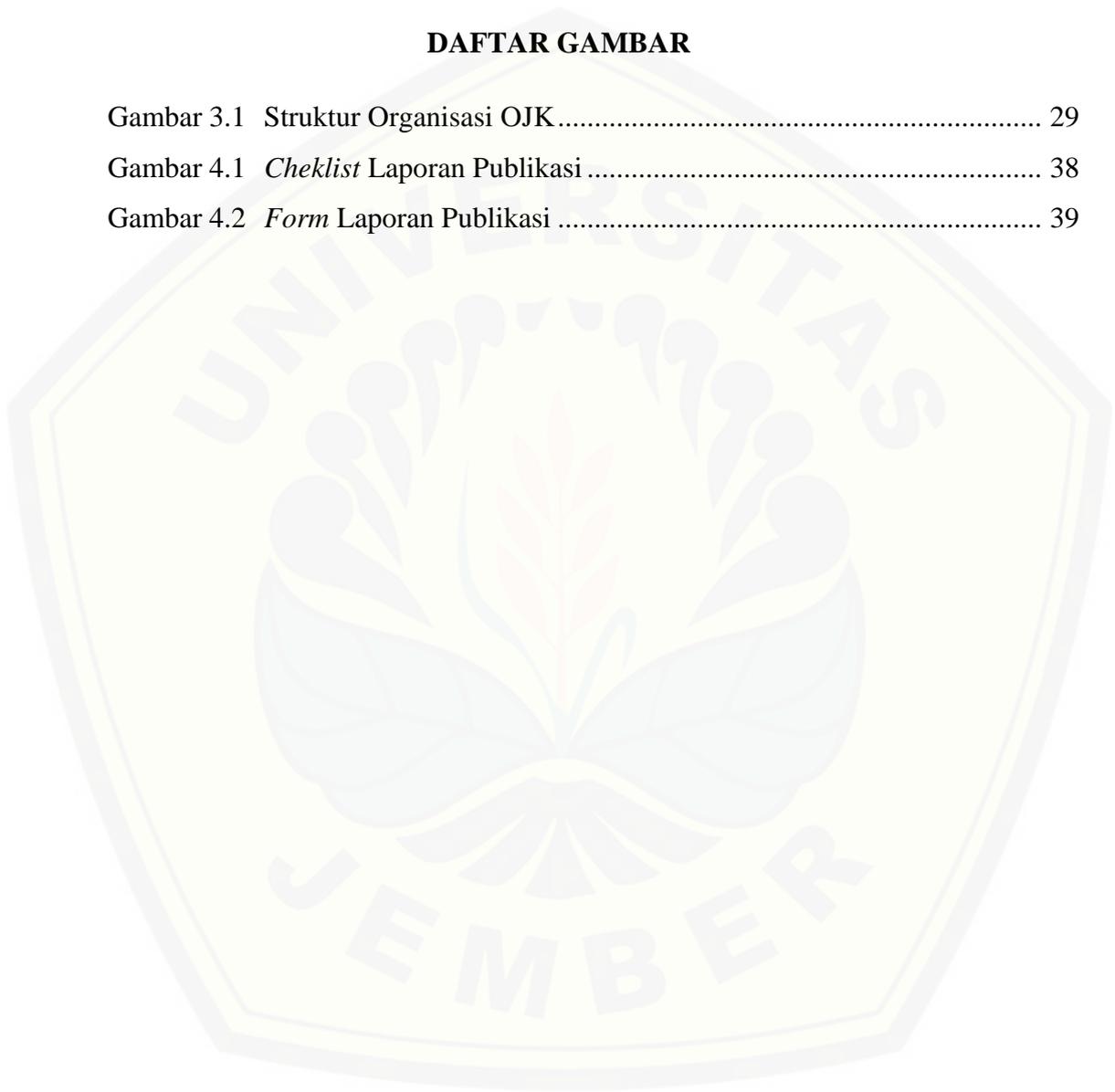
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL BAHASA INGGRIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR KELULUSAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	2
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Akuntansi Perbankan	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	6
2.1.2 Pengertian Perbankan.....	7
2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Perbankan di Indonesia	7
2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Perbankan.....	13
2.2 Pengertian Prosedur	14
2.3 Pengawasan Bank	15

2.3.1 Sistem Informasi Perbankan dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan	16
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	22
3.1 Latar Belakang Sejarah	22
3.2 Tujuan, Fungsi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan	23
3.3 Nilai-nilai Strategi Otoritas Jasa Keuangan	24
3.4 Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	24
3.5 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	25
3.6 Persebaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.....	27
3.7 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember	29
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	34
4.1 Prosedur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat.....	34
4.2 Membantu Melaksanakan Pengawasan Laporan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.....	36
4.2.1 Prosedur Mengisi <i>Cheklis</i> Laporan Publikasi	37
4.2.2 Prosedur Mengisi <i>Form</i> Laporan Publikasi	39
4.2.3 Prosedur Mengarsip Laporan Publikasi	40
BAB 5 KESIMPULAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	43

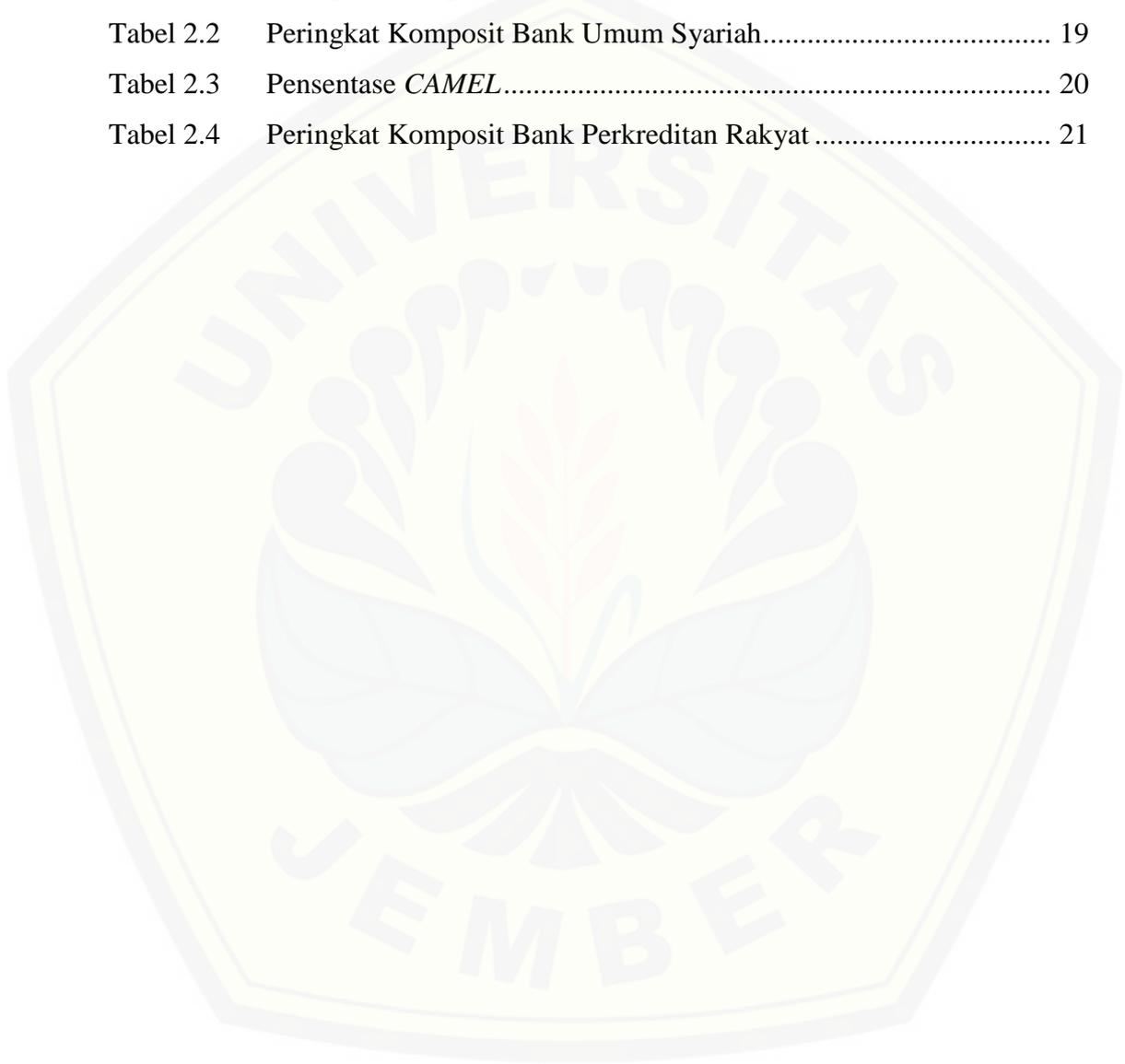
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi OJK.....	29
Gambar 4.1	<i>Cheklis</i> Laporan Publikasi	38
Gambar 4.2	<i>Form</i> Laporan Publikasi	39



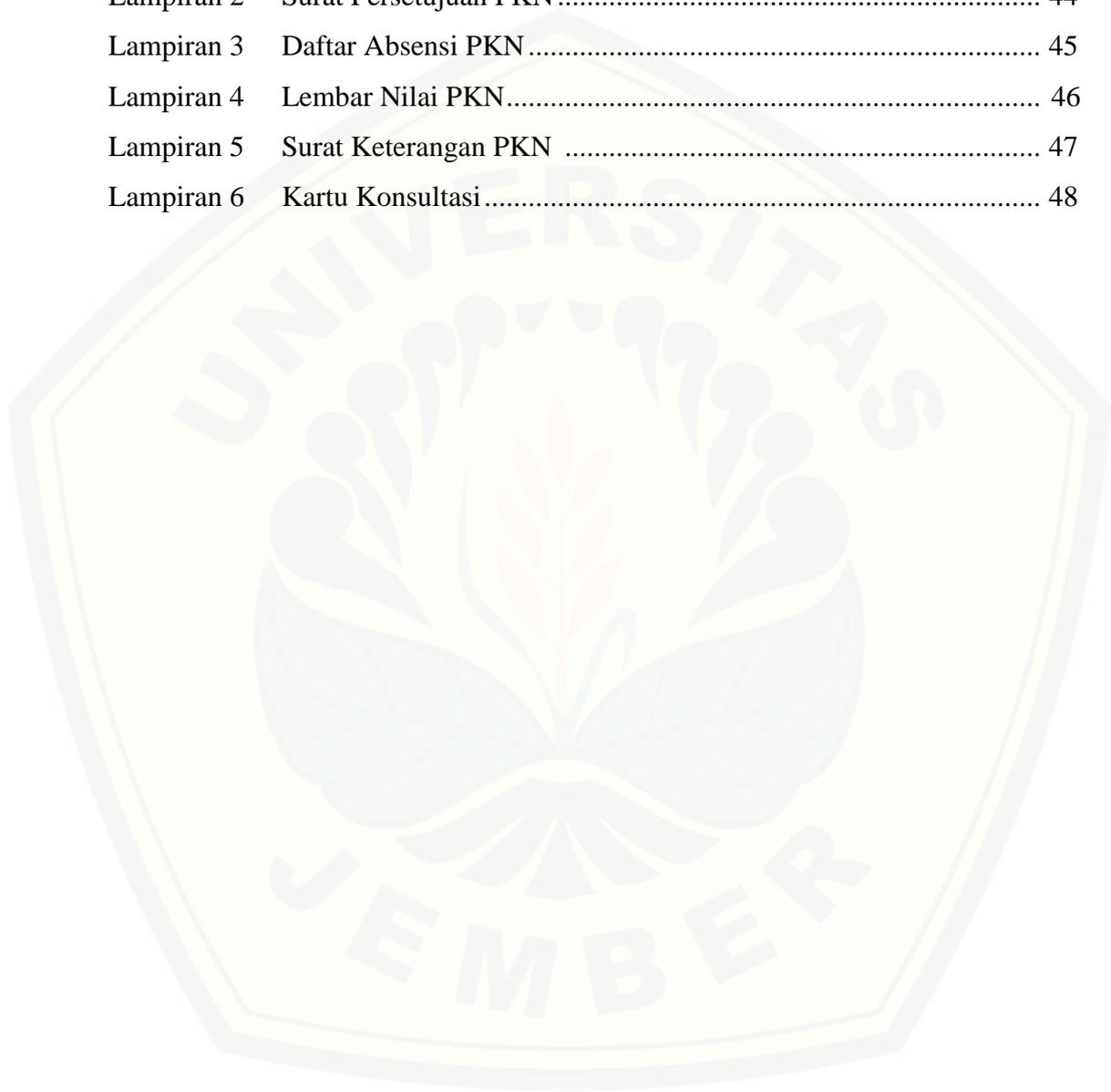
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
Tabel 2.1	Peringkat Komposit Bank Umum Konvensional.....	18
Tabel 2.2	Peringkat Komposit Bank Umum Syariah.....	19
Tabel 2.3	Persentase <i>CAMEL</i>	20
Tabel 2.4	Peringkat Komposit Bank Perkreditan Rakyat	21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan PKN	43
Lampiran 2	Surat Persetujuan PKN	44
Lampiran 3	Daftar Absensi PKN	45
Lampiran 4	Lembar Nilai PKN	46
Lampiran 5	Surat Keterangan PKN	47
Lampiran 6	Kartu Konsultasi	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap industri keuangan di Indonesia meliputi bank, pasar modal, asuransi, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan/*leasing*. Otoritas Jasa Keuangan terbentuk dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU”. UU yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diatas baru terbentuk pada tahun 2011 yaitu: UU. No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk karena beberapa keharusan atau tuntutan yaitu sistem perekonomian yang semakin kompleks dan permasalahan di sektor keuangan, misalnya konglomerasi keuangan, yang mana terdapat keterkaitan ataupun saling berhubungan antara lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi maupun lembaga pembiayaan lainnya. Disisi lain muncul juga yang namanya *Hibrid Products* seperti pemasaran produk investasi melalui bank, dan juga adanya *regulatory arbitrage* dimana adanya perbedaan legulator antara Bank Indonesia dengan Bapepam-LK sebagai institusi yang menangani fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan IKNB lainnya sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan yang ada di sektor keuangan seperti adanya *moral hazard* ataupun suatu perilaku jasa keuangan yang menyimpang dari ketentuan, misalnya dalam hal perlindungan konsumen, yakni belum adanya unit pelayanan konsumen di lembaga jasa keuangan, mekanisme pelayanan yang masih belum terstandarisasi, serta praktek bisnis lain yang dianggap merugikan.

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini menarik minat saya untuk mengetahui lebih dalam dan menggali informasi mengenai Prosedur Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat pada Otoritas Jasa Keuangan Jember. Bank Perkreditan Rakyat yang diawasi oleh (OJK) meliputi semua Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo. Berdasarkan tersebut, maka saya tertarik untuk PKN dengan judul "PROSEDUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN JEMBER".

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan Jember.
- b. Untuk membantu pelaksanaan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Memperoleh wawasan pengalaman dan pengetahuan mengenai Otoritas Jasa Keuangan serta mengetahui pelaksanaan pengawasan Bank Perkreditan Rakyat pada Otoritas Jasa Keuangan Jember.
- b. Mengetahui manfaat dengan hadirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang berperan aktif dalam memaksimalkan kinerja lembaga jasa keuangan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

1. Objek Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.224 Jember.

2. Jangka Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 144 jam kerja efektif mulai tanggal 23 Februari 2015 s/d 26 Maret 2015, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember, adapun jam kerja pada Otoritas Jasa Keuangan Jember adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Jumat : 07.10 – 16.30
- b. Istirahat : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis)
: 11.30 – 13.00 (Jumat)
- c. Sabtu – Minggu : Libur



1.4 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

Tabel 1.1: Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

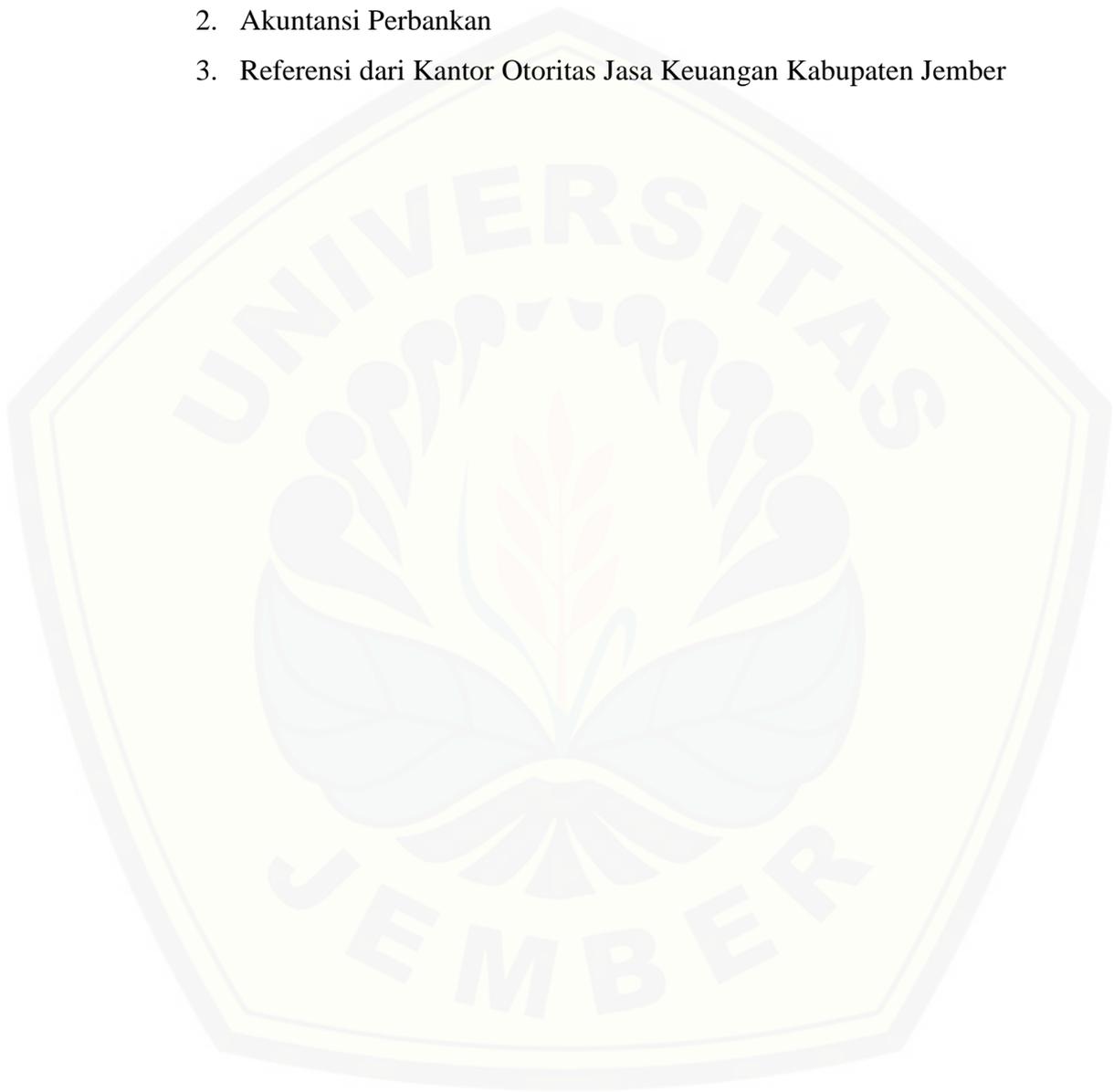
No	Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Minggu Ke-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X	X	X	X	5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember	X				3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Dinas Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember	X	X			6
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	80
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodic	X	X	X	X	15
6	Penyusunan Laporan PKN				X	20
7	Penggandaan Laporan PKN				X	5
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

Sumber data: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember, 2015

1.5 Landasan Bidang Ilmu Praktik Kerja Nyata

Bidang ilmu yang dipakai sebagai dasar/pedoman dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dan Penyusunan Laporan adalah:

1. Pengantar Akuntansi
2. Akuntansi Perbankan
3. Referensi dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kabupaten Jember



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perbankan

Globalisasi ekonomi telah mendorong penerapan standarisasi perlakuan dan penyajian informasi akuntansi yang berpedoman kepada *International Accounting standard (IAS)*. Standardisasi penyajian informasi akuntansi diperlukan karena banyak pihak (*stakeholder*) berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan perbankan adalah salah satu perusahaan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, sangat membutuhkan standadisasi dalam penyajian laporan keuangan, karena masyarakat sangat membutuhkan informasi dan kondisi bank di mana mereka menyimpan milyaran bahkan triliunan uangnya. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan informasi perusahaan perbankan agar dapat membandingkan, menganalisis, menyimpulkan, dan selanjutnya mengambil keputusan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan perbankan di mana dana mereka disimpan.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi, diantaranya sebagai berikut. Adalah: “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu organisasi.” (Jusup, 2005:5). “Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.” (Rudianto, 2009:4). Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* (Baridwan, 2004:1) Mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kualitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntansi merupakan proses pengolahan data (pencatatan dan penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisan) keuangan untuk menghasilkan informasi dalam

bentuk laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan berdasarkan undang-undang diantaranya adalah: berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang pengertian bank adalah: “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa undang-undang tersebut dapat dinyatakan bahwa perbankan merupakan sebagai intitusi intermediasi yaitu sebagai alat penghimpun dan penyalur dana yang berasal dari masyarakat dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.3 Standar Akuntansi Keuangan Perbankan di Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 31 (revisi 2000) tentang akuntansi perbankan telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk diterapkan di bank-bank yang beroperasi di Indonesia. PSAK tersebut bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan laporan keuangan bank. Elemen-elemen laporan keuangan yang diwajibkan untuk diterbitkan menurut PSAK ini terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal pemilik (untuk jenis perusahaan perseroan digunakan Laporan Laba Ditahan), dan Laporan Arus Kas serta catatan atas laporan keuangan (PSAK No. 31 Revisi 2000). Semua elemen laporan keuangan di atas harus diberikan identifikasi berupa nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode laporan. Pengidentifikasian ini penting agar pembaca laporan keuangan lebih mudah mengidentifikasi dan memahami laporan keuangan yang diterimanya. Keempat elemen tersebut adalah: neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan modal; dan laporan arus kas.

a. Neraca

Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, misalnya Neraca per 31 Desember 2005. Komponen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Di dalam proses pencatatannya, bank harus menetapkan kebijakan pengakuan atas aktiva, kewajiban, dan modal sehingga menjadi pedoman baku bagi penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten. Pengakuan aktiva dalam neraca dilakukan apabila manfaat ekonomi masa depan dari aktiva tersebut dapat diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sebaiknya aktiva tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir di dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan.

Sebagai alternatifnya, transaksi semacam ini menimbulkan beban dalam laporan laba rugi. Misalnya pengeluaran biaya dibayar di muka, apabila masih memberikan manfaat ekonomi pada masa depan akan dicatat sebagai aktiva akun biaya dibayar di muka, namun apabila tidak lagi memberikan manfaat ekonomi akan dicatat dalam laporan laba rugi pada akun biaya. Pengakuan kewajiban dalam neraca dilakukan apabila besar kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.

Selanjutnya dalam penyajian laporan keuangan, bank harus menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya mulai dari yang paling likuid ke yang kurang likuid. Pos-pos akun neraca antara lain meliputi: kas, giro pada bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, aktiva tetap, aktiva lain-lain, kewajiban segera, simpanan, simpanan dari bank lain, pinjaman diterima, estimasi kerugian komitmen kontijensi, kewajiban lain-lain modal pinjaman, dan modal.

- 1) Kas
Dalam pengertian ini yang dimaksudkan dengan kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah ataupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
- 2) Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank Indonesia merupakan saldo giro milik bank-bank umum yang tercatat dalam pembukuan di Bank Indonesia. Saldo giro dipergunakan untuk menyelesaikan transaksi kliring dan utang piutang lainnya yang dilakukan melalui Bank Indonesia.
- 3) Giro pada Bank Lain
Giro pada bank lain adalah saldo giro milik bank yang ditempatkan di bank lain, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Giro ini dibuka untuk menyelesaikan transaksi utang piutang yang dilakukan melalui bank tersebut.
- 4) Penempatan pada Bank Lain
Penempata pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk *intrbank call money*, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.
- 5) Efek-efek
Efek adalah surat berharga, yaitu surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka, dan setiap derivatif dari efek.
- 6) Kredit
Kredit merupakan pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, dan pembagian hasil keuntungan.
- 7) Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan dipergunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan dan aktiva yang disusutkan, mencakup tanah/hak atas tanah, bangunan, mesin serta peralatan lainnya ataupun sumber-sumber alam.

8) Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung aktiva-aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos aktiva di atas dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Contoh: emas batangan, mata uang asing yang ditarik dari peredaran, agunan yang diambil alih, biaya yang ditanggungkan, biaya dibayar di muka, persekot internal, uang muka pajak penghasilan, dan lain-lain.

9) Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perijinan yang ditetapkan sebelumnya. Yang termasuk dalam pos kewajiban segera antara lain kiriman uang (transfer), penerimaan pajak melalui bank yang masih harus disetor (bank Persepsi), deposito sudah jatuh tempo yang belum diambil oleh nasabah, bunga yang sudah jatuh tempo dan belum diambil oleh nasabah, dan sebagainya.

10) Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Bentuk simpanan tersebut berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang disamakan dengan bentuk simpanan tersebut.

11) Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank kepada bank lain, baik dalam negeri ataupun di luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenisnya.

12) Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

13) Estimasi Kerugian Komitmen Kontijensi

Estimasi kerugian komitmen kontijensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontijensi oleh nasabah.

14) Kewajiban lain-lain

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) pengertian kewajiban lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban-kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu akun-akun kewajiban dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. Kewajiban lain-lain terdiri dari pendapatan diterima di muka, setoran jaminan L/C atau garansi bank, beban bunga yang masih harus dibayar, taksiran pajak penghasilan, dan sebagainya.

15) Modal pinjaman

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) ditetapkan pengertian modal pinjaman adalah pinjaman yang disertai dengan penerbitan *capital notes*, *loan stock*, atau warkat lain yang dipersamakan dengan itu. Penerbitan warkat Modal Pinjaman (*loan stock* atau *capital notes*) dicatat sebesar nilai nominal.

16) Modal

Dalam Pedoman Akuntansi Indonesia (PAPI) dinyatakan bahwa pengertian modal adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai

jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan.

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan posisi hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka/periode tertentu. Komponen laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Di dalam penyajiannya, bank harus menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk bertahap (*Multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain atau dengan kata lain laporan laba rugi harus membedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Di dalam proses pencatatannya, bank harus menetapkan kebijakan pengakuan atas pendapatan dan beban, sehingga menjadi pedoman baku bagi penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten.

Dalam penyajian laporan keuangan harus diurutkan mulai dari pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan lain atau dengan kata lain, laporan laba rugi harus diurutkan mulai dari unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional kemudian baru pendapatan dan beban dari kegiatan non-operasional. Ketentuan urutan penyajian laporan laba rugi ini telah diatur dalam PSAK No.31 (revisi 2000) sebagai berikut:

- 1) pendapatan bunga;
- 2) beban bunga;
- 3) pendapatan provisi dan komisi;
- 4) beban provisi dan komisi;
- 5) keuntungan atau kerugian penjualan efek;
- 6) keuntungan atau kerugian investasi efek;
- 7) keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing;
- 8) pendapatan deviden;
- 9) pendapatan operasional lainnya;
- 10) beban penyisihan kerugian kredit dan aktiva produktif lainnya;
- 11) beban administrasi umum; dan

12) beban operasional lain.

c. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal pemilik atau laporan laba ditahan merupakan laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (*cash flow statement*) disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan yang setara dengan kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Jadi dengan demikian komponen utama laporan arus kas adalah sumber-sumber penerimaan kas dan penggunaan-penggunaan kas.

2.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Perbankan

Di dalam menerbitkan laporan keuangan bank, ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan bank yang merupakan ciri informasi laporan keuangan bank dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang harus dipenuhi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan bank tersebut antara lain: dapat dipahami, relevan, objektivitas, keandalan, dan tepat waktu.

a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan bank harus mudah dipahami oleh pengguna. Untuk memenuhi maksud ini pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi.

b. Relevan

Informasi dalam laporan keuangan bank harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akan mempunyai kualitas apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna.

c. Objektivitas

Laporan keuangan bank akan bermanfaat jika disajikan secara objektif dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, pencatatan transaksi keuangan seharusnya didasarkan pada faktur/bukti asli, perhitungan fisik, dan sedapat mungkin bukti didasarkan pada fakta yang objektif. Jadi informasi harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan, sehingga tercapai sasaran penyampaian informasi yang dimaksudkan.

d. Keandalan

Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna harus memberikan informasi yang andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sehingga penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan.

e. Tepat Waktu

Laporan keuangan agar bermanfaat bagi pengguna apabila disajikan tepat waktu, laporan keuangan yang terlambat disajikan tidak akan bermanfaat bagi penggunanya.

2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teratur dan berurutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih. Tujuan dari pengadaan prosedur adalah untuk menjamin adanya penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi berulang-ulang. Prosedur akuntansi sangat berperan penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya, baik bagi pihak penyelenggara usaha maupun pihak luar. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2005:5). Menurut W. Gerald cole (dalam Baridwan, 1998:3) menyatakan, prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau

lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

2.3 Pengawasan Bank

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Otoritas Jasa Keuangan menerapkan dengan dua pendekatan yakni: pengawasan berdasarkan kepatuhan dan risiko.

1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*compliance based supervision*)

yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko.

2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (*risk based supervision/RBS*)

yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Pengawasan bank berdasarkan risiko dilakukan terhadap jenis-jenis risiko sebagai berikut:

- a. risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya;
- b. risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variable pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar;
- c. risiko likuiditas adalah risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo;
- d. risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank;

- e. risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna;
- f. risiko reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank;
- g. risiko strategi merupakan risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal;
- h. risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku;

2.3.1 Sistem Informasi Perbankan Dalam Rangka Mendukung Tugas Pengawasan Bank

Ada beberapa macam sistem informasi perbankan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank yaitu: sistem informasi perbankan, sistem informasi, manajemen, pengawasan bank perkreditan rakyat, dan ketentuan tingkat kesehatan bank.

a. Sistem Informasi Perbankan

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan pengawas bank dalam melakukan kegiatan analisa terhadap kondisi bank, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank (termasuk tingkat kesehatan bank/TKS), meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. SIP dikembangkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan bank melalui informasi yang berkualitas, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) SIP diarahkan sebagai *business tool* sekaligus media penyajian informasi secara cepat hingga level strategis;

- 2) SIP menyediakan informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lain terkait lingkungan bisnis dari bank;
 - 3) SIP mengintegrasikan data-data yang saat ini tersebar pada sistem yang berbeda-beda;
- b. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan BPR, Otoritas Jasa Keuangan telah mengimplementasikan sistem informasi sebagai berikut:
- 1) sistem pelaporan *online*, yang memungkinkan BPR untuk menyampaikan laporan berkala secara *online* kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelaporan serta efisiensi, saat ini BPR menyampaikan empat jenis laporan berkala secara *online* yaitu: laporan bulanan, laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan debitur (SID), dan laporan keuangan publikasi BPR; dan
 - 2) sistem pengolahan data, yang dikembangkan untuk menghilangkan pengulangan input data sehingga meminimalisasi *human error* dan inkonsistensi data, data laporan berkala BPR yang diterima Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan kemudian diolah untuk kepentingan pengawasan maupun statistic sebagai bahan pendukung kebijakan pengembangan industry BPR.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan BPR, pengembangan sistem informasi BPR mengarah pada sistem pengawasan yang lebih terfokus pada arti pengawasan secara *offsite* maupun *onsite* kepada kondisi yang dihadapi BPR. Pengembangan *Early Warning System* (EWS) BPR dilakukan untuk menunjang pemantauan kondisi BPR secara *offsite*, melengkapi penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk menunjang pengawasan secara *onsite* telah dikembangkan *tool* untuk membantu pengawas dalam melakukan pemeriksaan BPR.

c. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKS)

Ada beberapa ketentuan dalam penilaian tingkat kesehatan bank yaitu antara lain sebagai berikut: bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

1) Bank Umum Konvensional

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi pada akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assessment* TKS bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:

- a) profil risiko (*risk profile*)
- b) *good corporate governance (GCG)*;
- c) rentabilitas (*earnings*); dan
- d) permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan tersruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peringkat Komposit Bank Umum Konvensional

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi bank secara umum <i>sangat sehat</i> sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi bank secara umum <i>sehat</i> sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi bank secara umum <i>cukup sehat</i> sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

dilanjutkan ke halaman 19

lanjutan tabel 2.1 halaman 18

PK-4	Kondisi bank secara umum <i>kurang sehat</i> sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi bank secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber: Booklet perbankan Indonesia 2014

2) Bank Umum Syariah

Penilaian tingkat kesehatan BUS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- a) Peningkatan peringkat komponen atau rasio keuangan pembentuk faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung secara kuantitatif;
- b) Penilaian komponen pembentuk faktor manajemen dilakukan melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur *judgement*; dan
- c) Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor manajemen, PK yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Peringkat Komposit Bank Umum Syariah

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>baik</i> dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industry keuangan namun bank dan UUS masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>cukup baik</i> namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank dan UUS tidak segera melakukan tindakan korektif.

dilanjutkan ke halaman 20

lanjutan tabel 2.2 halaman 19

PK-4	Mencerminkan bahwa bank dan UUS tergolong <i>kurang baik</i> dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industry keuangan atau bank dan UUS memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank dan UUS <i>sangat sensitif</i> terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian, industry keuangan, dan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Sumber: Booklet Perbankan Indonesia 2014

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada dasarnya tingkat kesehatan BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas AP, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (*CAMEL*). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

- a) Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat;
- b) Bobot setiap faktor *CAMEL* adalah:

Tabel 2.3 Persentase *CAMEL*

No	Faktor <i>CAMEL</i>	Bobot
1.	Permodalan	30%
2.	Kualitas Aktiva	30%
3.	Kualitas Manajemen	20%
4.	Rentabilitas	10%
5.	Likuiditas	10%

Sumber: Booklet Perbankan Indonesia 2014

- c) Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan BPR meliputi pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Anti Pencucian Uang (APU)

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; dan

d) Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan bank menjadi tidak sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktik bank dalam bank, praktik perbankan lain dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Penilaian TKS BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. Penilaian atas komponen dari faktor-faktor tersebut dilakukan secara kualitatif, sedangkan penilaian faktor manajemen dilakukan secara kualitatif. Penilaian secara kualitatif dilakukan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian faktor peringkat faktor manajemen, ditetapkan PK yang merupakan peringkat akhir hasil penilaian TKS bank. PK ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Peringkat Komposit Bank Perkredita Rakyat

PK	Keterangan
PK-1	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang sangat baik.
PK-2	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.
PK-3	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.
PK-4	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang kurang baik.
PK-5	Mencerminkan bahwa bank memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Sumber: Booklet Perbankan Indonesia 2014

BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Sejarah

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambatnya 31 Desember 2002. Dan hal tersebutlah, yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan.

Perintah untuk pembentukan lembaga pengawasan ini, yang kemudian dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan dalam kurun waktu hampir satu dekade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan yang belakangan ada banyak fenomena-fenomena negatif. Seperti Kasus Bank Century yang melakukan penyimpangan tanpa ada ketakutan bertindak dan dikarenakan memang tidak ada lembaga tertentu yang menjadi pengawas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini bisa menjadi penting, apabila dalam perkembangan praktek perbankan dan pengawasan perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kepentingan.

Para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK ini, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global. Namun, RUU OJK harus dibahas simultan dengan paket RUU Keuangan lain, seperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar Modal serta amandemen UU Bank Indonesia, Perasuransian dan Dana Pensiun. Hal tersebut terungkap dalam seminar Reformasi. Sektor Keuangan

memperkuat Fondasi, Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Nasional. Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.

Sosialisasi mengenai OJK diperlukan dan sebelum OJK akan diberlakukan di Januari 2013, maka perlu adanya sosialisai kepada masyarakat Indonesia tentang keberadaan OJK ini nantinya sekaligus untuk memberitahukan tentang tujuan dan fungsi OJK itu sendiri yang termuat didalam UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sedangkan untuk pembentukkan Dewan Komisioner atau pimpinan tertinggi OJK akan dilaksanakan pada Desember 2012.

Pengawasaj oleh OJK dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner. Ketua Dewan Komisioner akan membawahkan tiga anggota dewan komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.

3.2 Tujuan Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dirikan mempunyai beberapa tujuan, fungsi dan tugas.

1. Tujuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan;

- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Fungsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
3. Tugas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

3.3 Nilai-Nilai Strategi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas jasa Keuangan juga mempunyai beberapa nilai-nilai strategis yaitu sebagai berikut:

1. Integritas

Adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2. Profesionalisme

Adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
3. Sinergi

Adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4. Inklusif

Adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
5. Visioner

Adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Foward Looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*).

3.4 Visi dan Misi OJK

Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai visi dan misi kedepannya agar menjadi lembaga yang dihapkan semua pihak.

1. Visi

Beberapa visi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Misi

Beberapa misi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3.5 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Adapun beberapa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Kewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang pengaturan
 - a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
 - b. Menetapkan pengaturan perundang-undangan bagi sektor jasa keuangan
 - c. Menetapkan kebijakan tentang tugas yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengelola lembaga jasa keuangan
 - e. Menetapka struktur organisasi dan memelihara dan mengelola, aset kekayaan dan kewajiban
 - f. Menetapkan peraturan mengenai prosedur pengenaan sanksi dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Bidang Pengawasan
 - a. Membuat dan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan

- b. Mengawasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kepala Eksekutif
 - c. Melakukan pemeriksaan, pengaturan, pengawasan, perlidungan konsumen, dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk pelaku jasa keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan
 - d. Menetapkan sanksi tertentu bagi pelaku jasa keuangan yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - e. Memberikan dan mencabut :
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Surat tanda terdaftar;
 - 4) Persetujuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha;
 - 5) Pengesahan;
 - 6) Penetapan atau pengesahan pembubaran; dan
 - 7) Serta penetapan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Kerugian
 - a. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan produk jasa keuangan yang belum mereka ketahui dan pahami
 - b. Meminta lembaga jasa keuangan agar menghentikan kegiatannya apabila terindikasi merugikan masyarakat
 - c. Serta tindakan lain yang dianggap perlu
 4. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pelayanan Pengaduan Konsumen
 - a. Menyiapkan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku jasa keuangan
 - b. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku jasa keuangan
 5. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembelaan Hukum
 - a. Melakukan tindakan tertentu atau memerintahkan kepada lembaga jasa keuangan agar menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tersebut

- b. Mengajukan gugatan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang merasa dirugikan untuk dikembalikan, serta untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen ataupun lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan.

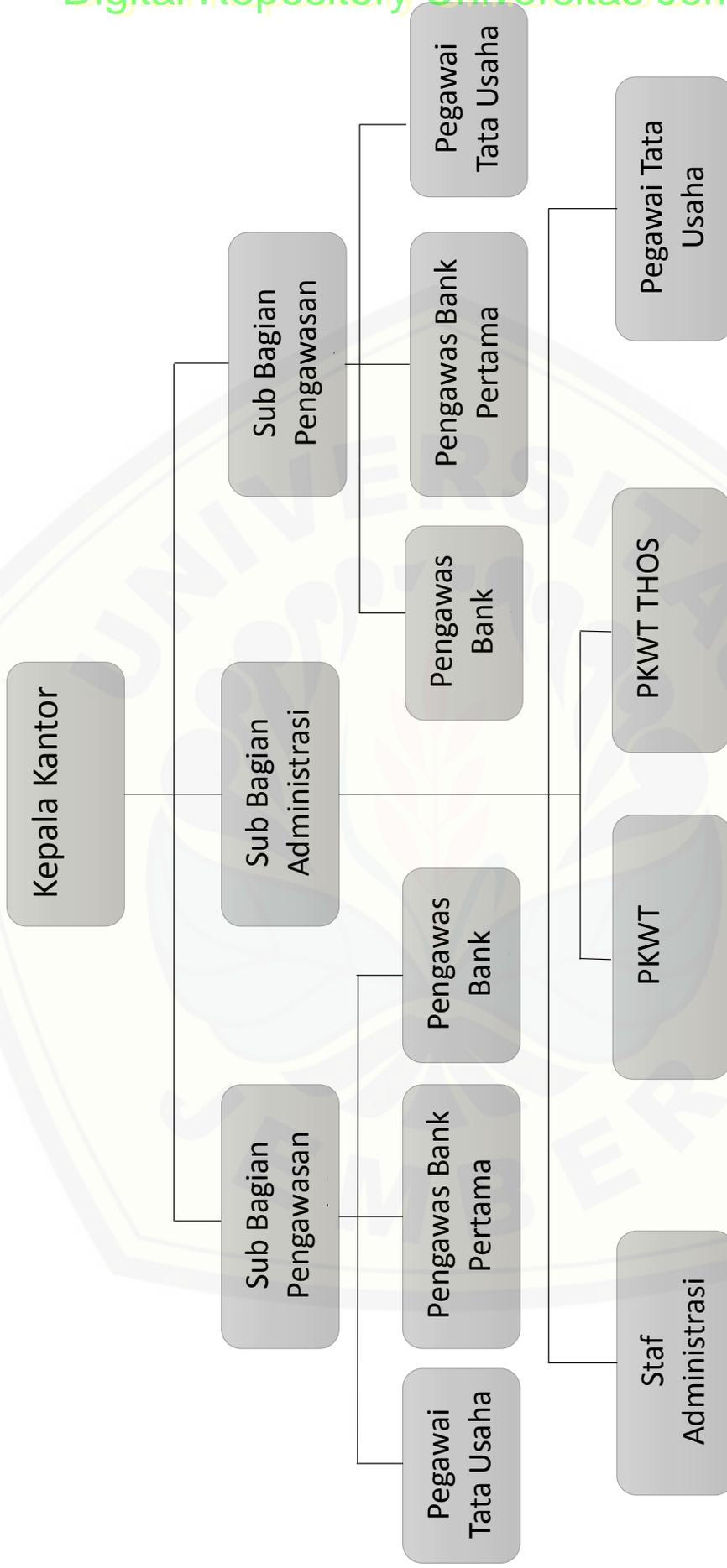
3.6 Persebaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Persebaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan terbagi atas enam kantor regional yaitu sebagai berikut:

1. Kantor regional yang berada di Jakarta, yang membawahi empat kantor.
 - a. Kantor OJK Bandar Lampung
 - b. Kantor OJK Pontianak
 - c. Kantor OJK Samarinda
 - d. Kantor OJK Palangkaraya
2. Kantor Regional OJK II berada di kota Bandung. Kantor regional II ini membawahi dua kantor.
 - a. Kantor OJK Cirebon
 - b. Kantor OJK Tasikmalaya
3. Kantor Regional III berada di Surabaya. Kantor Regional ini membawahi enam kantor.
 - a. Kantor OJK Denpasar
 - b. Kantor OJK Kupang
 - c. Kantor OJK Mataram
 - d. Kantor OJK Malang
 - e. Kantor OJK Kediri
 - f. Kantor OJK Jember
4. Kantor Regional IV berada di Semarang. Kantor Regional IV ini membawahi empat kantor.
 - a. Kantor OJK Solo
 - b. Kantor OJK Jogjakarta
 - c. Kantor OJK Purwokerto
 - d. Kantor OJK Tegal

5. Kantor Regional V berada di Medan. Kantor Regional ini membawahi tujuh kantor.
 - a. Kantor OJK Banda Aceh
 - b. Kantor OJK Padang
 - c. Kantor OJK Batam
 - d. Kantor OJK Pekanbaru
 - e. Kantor OJK Jambi
 - f. Kantor OJK Bengkulu
 - g. Kantor OJK Palembang
6. Kantor Regional V berada di Makassar. Kantor Regional ini membawahi lima kantor.
 - a. Kantor OJK Jayapura
 - b. Kantor OJK Ambon
 - c. Kantor OJK Manado
 - d. Kantor OJK Palu
 - e. Kantor OJK Kendari

3.7 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember



Gambar 3.1: Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember

Sumber: data Otoritas Jasa Keuangan Jember, Tahun 2015

Struktur organisasi adalah suatu cara dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap kerja instansi, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas masing karyawan. Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember struktur organisasi berbentuk organisasi garis atau lini yaitu suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab struktur organisasi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember.
2. Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank 1 mempunyai fungsi sebagai *backup* dari Kepala Sub Bagian Administrasi. Di dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember terdapat bagian-bagian lain yang berada di bawah Kepala Sub Bagian Pengawas Bank 1 yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengawas Bank Yuniior mempunyai tugas :
 - 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
 - 2) pengawasan bank umum;
 - 3) asisten kehumasan.
 - b. Pengawas Bank Yuniior mempunyai tugas :
 - 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
 - 2) pengawasan bank umum;
 - 3) verifikator anggaran.
 - c. Pengawas Bank Yuniior mempunyai tugas :
 - 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
 - 2) pengawasan bank umum;

3) MC.

d. Pengawas Bank Pertama

- 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
- 2) perizinan;
- 3) update data pokok;
- 4) rencana pemeriksaan.

e. Pegawai Tata Usaha

- 1) administrasi pemeriksaan;
- 2) penatausahaan Sanksi Administrasi;
- 3) database Perbankan;
- 4) kearsipan;
- 5) absensi laporan bank perkreditan rakyat.

3. Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank 2 mempunyai fungsi yaitu sebagai *backup* dari Kepala Sub Bagian Pengawas Bank 1. Di dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember terdapat bagian-bagian lain yang berada di bawah Kepala Sub Bagian Pengawas Bank 2 yaitu sebagai berikut:

a. Pengawas Bank Yuniior mempunyai tugas :

- 1) pengawasan bank perkreditan rakyat syariah;
- 2) pengawasan bank umum;
- 3) MIKU (Manajemen Internal Kinerja Utama).

b. Pengawas Bank Yuniior mempunyai tugas :

- 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
- 2) pengawasan bank umum;
- 3) asisten kehumasan.

c. Pengawas Bank Yuniior mempunyai tugas :

- 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
- 2) pengawasan bank umum;
- 3) verifikator anggaran.

d. Pengawas Bank Pertama

- 1) pengawasan bank perkreditan rakyat;
- 2) perizinan;

3) update data pokok.

e. Pegawai Tata Usaha

- 1) administrasi pemeriksaan;
- 2) penatausahaan sanksi administrasi;
- 3) database perbankan;
- 4) kearsipan;
- 5) absensi laporan bank perkreditan rakyat.

4. Kepala Sub Bagian Administrasi mempunyai fungsi yaitu sebagai *backup* Kepala Sub Bagian Pengawas Bank 2. Di dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan Jember terdapat bagian-bagian lain yang berada di bawah Kepala Sub Bagian Administrasi yaitu sebagai berikut:

a. Staf Administrasi mempunyai tugas :

- 1) bantuan hukum;
- 2) verifikator anggaran;
- 3) edukasi dan perlindungan konsumen;
- 4) kehumasan.

b. Pegawai Tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) administrasi kinerja SDM;
- 2) pelaksana anggaran;
- 3) kearsipan.

c. PKWT (Pegawai Kerja Waktu Tertentu) mempunyai tugas :

- 1) data entry SISKKA (Sistem Informasi Keuangan);
- 2) data entry SIPO.

d. PKWT (Pegawai Kerja Waktu Tertentu) mempunyai tugas :

- 1) data entry EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen);
- 2) aset / logistik / ATK;
- 3) keprotokolan.

e. PKWT THOS (Tenaga *Honorar Out Sourcing*) mempunyai tugas :

- 1) *Receptionist*/operator dan juga MC;
- 2) *Messenger*, membantu kearsipan;
- 3) *Driver*, mengemudi kendaraan dinas dalam kota dan luar kota;

- 4) Satpam, piket penjagaan keamanan kantor dan rumah dinas.

